

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian yang Digunakan

Penelitian merupakan rangkaian pengamatan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu terhadap suatu fenomena dengan tujuan membuktikan kebenaran dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode penelitian memiliki peran yang krusial dalam mengumpulkan data untuk penelitian dan menganalisis masalah yang diteliti guna mencapai tujuan.

Menurut Sugiyono (2022 : 2) pengertian metode penelitian yaitu:

“Metode penelitian adalah cara atau jalan yang harus ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang berisikan langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan penelitian survei. Menurut Sugiyono (2022 : 8) metode penelitian kuantitatif yaitu :

“Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/artistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”.

Menurut Sugiyono (2019 : 15) penelitian survei yaitu :

“Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, tes, wawancara, terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen)”.

Pada penelitian ini, survei yang dilakukan peneliti adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan uji statistik agar ditemukan fakta-fakta dari setiap variabel yang diteliti dan diketahui pengaruhnya antara variabel independen dan variabel dependen.

3.1.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2022 : 38) objek penelitian yaitu:

“Objek penelitian dalam penelitian ini yang diteliti meliputi Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat”.

3.1.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan verifikatif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya dan bertujuan untuk menyajikan gambar secara terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2022 35-36) pendekatan deskriptif yaitu:

“Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik hanya dari satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri), tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai permasalahan yang terkait dengan keberadaan setiap variabel. Penelitian deskriptif ini untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu, menjelaskan tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah; rumusan masalah kedua yaitu, menjelaskan tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); dan rumusan masalah ketiga yaitu, menjelaskan tentang Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.

Selain itu, menurut Sugiyono (2022 : 118) pendekatan verifikatif yaitu:

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode verifikatif untuk menjelaskan pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat. Metode verifikatif ini untuk menjawab rumusan masalah yang keempat, kelima, dan keenam. Hal ini dilakukan karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya, serta bertujuan untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang muncul dari hipotesis yang diajukan serta hubungan antar variabel yang sedang diteliti.

3.1.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan biasanya melibatkan pernyataan serta kuisisioner yang diberikan kepada setiap responden yang menjadi sampel dalam penelitian. Langkah ini dilakukan selama proses observasi dan wawancara.

Menurut Sugiyono (2022 : 166) instrumen penelitian yaitu:

“Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamat. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian”.

Instrumen penelitian dengan metode kuisisioner disusun berdasarkan indikator-indikator yang tercantum dalam tabel operasionalisasi variabel. Hal ini bertujuan agar setiap pertanyaan yang akan ditunjukkan kepada responden menjadi lebih terperinci. Data kuantitatif yang terdapat dalam operasionalisasi variabel akan diubah menjadi data kuantitatif melalui pendekatan statistik.

Secara umum teknik yang digunakan untuk memberikan skor pada kuesioner ini menggunakan skala likert.

Menurut Sugiyono (2019 : 146) skala likert yaitu:

“Skala likert merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”.

Dalam penelitian ini, peneliti secara khusus telah menetapkan fenomena sosial yang akan disebut sebagai variabel penelitian. Dengan menggunakan skala likert, variabel yang akan diukur dijelaskan sebagai indikator variabel. Selanjutnya, indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk merancang item-item instrumen, yang bisa berupa pertanyaan atau pernyataan.

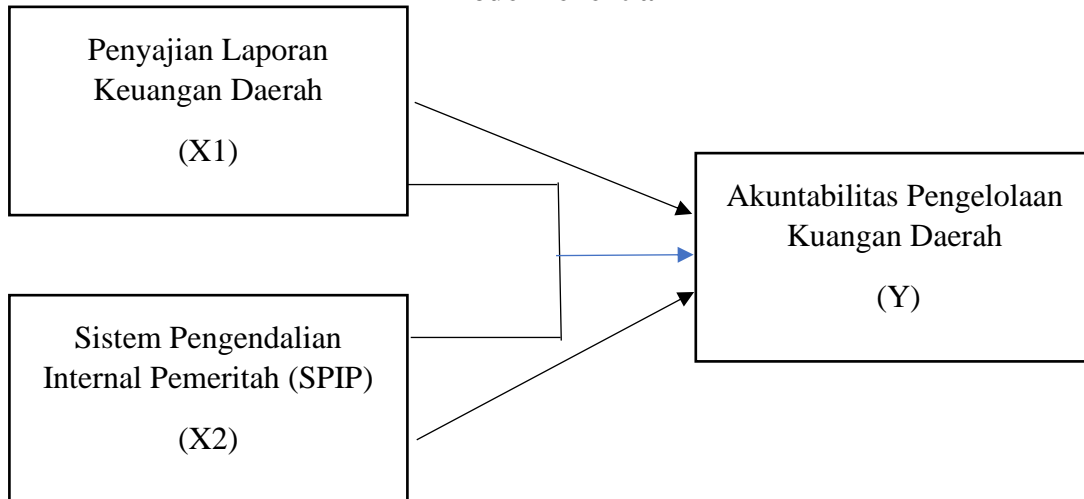
3.1.4 Unit Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menentukan unit penelitian yang akan dilakukan yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah yang berhubungan dan adanya keterkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. pada 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat.

3.1.5 Model Penelitian

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi peneliti yaitu “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. Maka model penelitian yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 1
Model Penelitian



Dari gambar diatas maka dapat dijelaskan, bahwa yang menjadi variabel independen yaitu variabel X1 dan X2, kemudian yang menjadi variabel dependen yaitu Y. Dari permodelan tersebut dapat dilihat bahwa Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2 Definisi Variabel dan Operasioanalisis Variabel Penelitian

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2022 : 57) definisi variabel yaitu:

“Definisi dari variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, organisasi, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”.

Pada umumnya, variabel dalam penelitian dapat dibagi menjadi dua variabel utama, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Peneliti akan menganalisis sejauh mana pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah definisi dari variabel-variabel yang digunakan:

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Menurut (Sugiyono, 2022 : 57) variabel bebas (independen) yaitu:

“Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang diteliti yaitu penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah.

Adapun penjelasan mengenai variabel tersebut adalah sebagai berikut:

a Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Definisi penyajian laporan keuangan daerah menurut Mahmudi (2016 : 13)

yaitu:

“Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stakeholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas dan menurut peraturang perundang-undangan”.

b Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Definisi sistem pengendalian internal pemerintah menurut Mahmudi (2016

: 252) yaitu:

“Sistem pengendalian intern pemerintah adalah bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi beserta seluruh karyawan yang dilakukan

bukan hanya bersifat *insidental* dan *responsive* atas kasus tertentu saja tetapi bersifat terus menerus.”

2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut Sugiyono (2022 : 57) variabel terikat (Dependen) yaitu:

“Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”.

Dalam variabel yang menjadi variabel dependen adalah Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun penjelasan mengenai variabel tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Khusaini (2018:71) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu:

“Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan”.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan dan menjelaskan konsep, dimensi, indikator serta skala dari variabel-variabel yang terkait dengan ini penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Akuntansi Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**, maka terdapat tiga variabel penelitian yaitu:

1. Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)
2. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Tabel 3. 1
Operasionalisasi Variabel Independen
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<p>Laporan keuangan adalah informasi yang disajikan untuk membantu stekholders dalam membuat keputusan sosial, politik dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas dan menurut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Mahmudi (2016:13)</p>	<p>Penyajian Laporan Keuangan Daerah ini berkaitan dengan kualitas, karena suatu Laporan Keuangan dilihat dari kualitasnya. Maka dari itu dimensi yang digunakan adalah Karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki, yaitu :</p> <p>1. Relevan</p>	<p>a Manfaat umpan balik b Manfaat prediktif c Tepat waktu d lengkap</p>	Ordinal	1-4
	<p>2. Andal</p>	<p>a Penyajian jujur b Dapat diverifikasi</p>		5-6
	<p>3. Dapat dibandingkan</p>	<p>a Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode untuk mengevaluasi kinerja b Konsisten dalam penerapan kebijakan akuntansi</p>		7-8

**Operasionalisasi Variabel Independen
Penyajian Laporan Keuangan Daerah (X1)**

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
	<p>4. Dapat dipahami</p> <p>Sumber: Mahmudi (2016:16) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019</p>	<p>a Informasi dapat dapat dipahami oleh pengguna</p> <p>b Pengguna informasi diasumsikan memiliki pengetahuan atau wawasan yang luas mengenai standar akuntansi yang berlaku</p>	Ordinal	9-10

Tabel 3. 2
Operasionalisasi Variabel Independen
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<p>Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah bagian integral dari sistem akuntansi pemerintahan. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses pengendalian yang melekat pada Tindakan dan kegiatan pimpinan organisasi berserta seluruh karyawan yang dilakukan bukan hanya bersifat <i>insidental</i> dan <i>responsive</i> atas kasus tertentu saja</p>	<p>Unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yaitu :</p> <p>1. Lingkungan Pengendalian</p>	<p>a penegakan nilai etika</p> <p>b komitmen terhadap kompetensi</p> <p>c kepemimpinan yang kondusif</p> <p>d pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan</p> <p>e pendelegasian wewenang yang tepat</p> <p>f penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia</p> <p>g perwujudan peran aparat pengawasan internal pemerintah yang efektif</p>	Ordinal	11-17

**Operasionalisasi Variabel Independen
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)**

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
Tetapi bersifat terus menerus.	2. penilaian resiko	a identifikasi resiko b analisis resiko	Ordinal	18-19
Mahmudi (2016:252)	3. kegiatan pengendalian	a Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang berkelanjutan b Pembinaan sumber daya manusia c Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi d Pengendalian aset e Penetapan ukuran kerja f Pemisahan fungsi g Otoritas atas transaksi penting h Pencatatan yang akurat atas transaksi i Akuntabilitas terhadap pencatatannya j Dokumentasi yang baik atas sistem	Ordinal	20-29

**Operasionalisasi Variabel Independen
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X2)**

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		pengendalian intern		
	4. Informasi dan komunikasi	a Menggunakan sarana komunikasi yang efektif b Melakukan komunikasi dalam bentuk tindakan yang positif	Ordinal	30-31
	5. Pemantauan Sumber: Mahmudi (2016:253)	a Pemantauan atau Evaluasi terpisah b Tindak lanjut	Ordinal	32-33

Tabel 3. 3
Operasionalisasi Variabel Dependen
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
<p>Akuntabilitas merupakan inti dari proses anggaran. Akuntabilitas membuat pejabat yang mendapat tugas melaksanakan dan dan mempertanggungjawabkan anggaran harus dapat mengungkapkan bagaimana dana masyarakat akan digunakan</p> <p>Khusaini (2018:71)</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu :</p> <p>1. Perencanaan dan penganggaran</p>	<p>a Pengintegrsian rencana kerja</p> <p>b Penyatuan anggaran (<i>Unifoed Budget</i>)</p> <p>c Penganggaran berbasis kinerja</p> <p>d Penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM)</p> <p>e Klasifikasi anggaran</p>	Ordinal	34-38
	<p>2. Pelaksanaan anggaran</p>	<p>a Sistem penerimaan</p> <p>b Sistem pembayaran</p>	Ordinal	39-40
	<p>3. Akuntansi</p>	<p>a Pembagian kerja yang jelas</p> <p>b Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan</p> <p>c Menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk</p>	Ordinal	41-43

Operasionalisasi Variabel Dependen
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
		pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan.		
	4. Pemeriksaan	<p>a Pemerintah pusat maupun daerah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya kepada rakyat yang diwakili oleh DPR/DPRD</p> <p>b Perlu adanya pihak yang kompeten untuk menguji laporan pertanggungjawaban</p> <p>c Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)</p>	Ordinal	44-46

Operasionalisasi Variabel Dependen
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item
	<p style="text-align: center;">5. Pertanggungjawaban</p> <p style="text-align: center;">Sumber : Rusmana, Setyaningrum, Yuliansyah, & Maryani (2017:44); Putri (2017; Kurniawan & Rahayu (2017); Mansyuer, T. Y., & Effendi (2020)</p>	<p>a Pertanggung jawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan</p> <p>b Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR/DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK</p> <p>c Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir</p> <p>d Dilampirkan ikhtisar laporan keuangan pemerintah daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaanya diatur secara khusus, seperti BLU (Badan Layanan Umum)</p>	Ordinal	47-50

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2022 : 130) populasi penelitian yaitu:

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Pada bagian populasi dan sampel penelitian ini, yaitu 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat yang hanya meliputi Badan dan Dinas. Dari 30 SKPD tersebut diambil 3 responden untuk masing-masing SKPD sehingga totalnya terdapat 30 responden.

Tabel 3. 4
Populasi atau Sampel Penelitian

No.	Instansi
1.	Sekretariat Daerah
2.	Sekretariat DPRD
3.	Inspektorat Daerah
4.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Badan Pendapatan Daerah
7.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
13.	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

15.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
16.	Dinas Kesehatan
17.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
19.	Dinas Pendidikan
20.	Dinas Lingkungan Hidup
21.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
23.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
24.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
25.	Dinas Tenaga Kerja
26.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)
27.	Dinas Perhubungan
28.	Dinas Perikanan dan Peternakan
29.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
30.	Dinas Sosial

Sumber: bandungbaratkab.go.id

3.3.2 Teknik Sampling

Pada penelitian ini akan mengambil metode *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik Sampling Jenuh. Menurut Sugiyono (2022 : 85) definisi sampling jenuh yaitu:

“Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel”.

3.3.3 Sampel

Menurut Sugiyono (2022 : 131) menjelaskan sampel penelitian yaitu:

“Dalam penelitian kuantitatif, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili)”.

Pengukuran sampel adalah tahap untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam suatu penelitian. Maka dari itu, penting untuk memilih sampel yang bisa mencerminkan segala karakteristik populasi, sehingga sampel tersebut dapat menggambarkan keadaan sebenarnya atau mewakili (*representatif*).

Pada penelitian ini yang dijadikan sampel yaitu 30 SKPD Kabupaten Bandung Barat yang diwakilkan oleh Kepala Dinas, Kaassubag Keuangan, dan Kassubag Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan karena bagian tersebut yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, pengelolaan dan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga total responden pada penelitian ini sebanyak 30 responden, didapat dari total populasi 30 SKPD dan setiap SKPD terdapat 3 responden.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dimana data diperoleh dari hasil penelitian langsung kepada pihak yang terkait. Selain itu, peneliti

juga menggunakan data yang berasal dari *litelature* seperti penelitian terdahulu dan buku-buku yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Menurut Sugiyono (2019 : 196) mendefinisikan sumber data primer sebagai berikut:

“Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Selain itu, Sugiyono (2019:193) mendefinisikan bahwa sumber data sekunder sebagai berikut:

“Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Data sekunder didapatkan dari sumber yang dapat mendukung penelitian antara lain dari dokumentasi dan *litelature*”.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022 : 296) teknik pengumpulan data yaitu:

“Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama dalam penelitian yaitu dengan teknik pengumpulan data, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data”.

Teknik pengumpulan data pada penlitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuisisioner. Kuisisioner yang berisi pernyataan dalam pengumpulan data. Dalam mengukur jawaban dan pendapat responden menggunakan skala likert yang mana terbagi menjadi lima tingkatan penilaian berupa pertanyaan. Pertanyaan pada bagian ini dikembangkan dengan menggunakan skala likert yang masing-masing buah

pernyataan diberi skor 1 sampai 5: Skor 1 untuk Tidak Pernah (TP); Skor 2 untuk Hampir Tidak Pernah (HTP), Skor 3 untuk Kadang-kadang (KK); Skor 4 untuk Sering (SR); Skor 5 untuk Selalu (SL).

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengelolaan data. Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dipahami, dibaca, dan diinterpretasikan.

Menurut Sugiyono (2019:206) mendefinisikan mengenai analisis data yaitu sebagai berikut:

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka digunakan statistik yang merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam satu penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik dengan menggunakan *software IBM SPSS*.

3.6 Rancangan Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

3.6.1 Rancangan Analisis Data

Rancangan analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari

seluruh responden terkumpul. Menurut Sugiyono (2019:206) analisis data adalah sebagai berikut:

“Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.”

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah, dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari pemerintahan yang diteliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik dengan menggunakan program *Statistical Package For Social Sciences (SPSS)*.

3.6.2 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Instrumen penelitian sebelum digunakan sebagai alat untuk mendapatkan data primer melalui penyebaran kuesioner, harus terlebih dahulu diuji validitas dan reabilitasnya. Pengujian ini dilakukan agar pada saat penyebaran kuesioner, instrumen-instrumen penelitian tersebut sudah valid atau realible, yang artinya alat ukur untuk mendapatkan data sudah dapat digunakan.

3.6.2.1 Uji Validitas

Suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diperlukan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat

sehingga data yang didapat dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat validitas instrumen yang akan digunakan. Suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai tingkat kesalahan kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang memadai.

Menurut Sugiyono (2019:175) yang dimaksud dengan uji validasi adalah sebagai berikut:

“Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur yang seharusnya diukur.”

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis item yang mengoreksi skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir. Jika item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut dikemukakan oleh Sugiyono (2019:183) yang harus dipenuhi memiliki kriteria sebagai berikut:

- a Jika koefisien korelasi $r > 0,30$ maka item tersebut dinyatakan valid,
- b Jika koefisien korelasi $r < 0,30$ maka item tersebut dinyatakan tidak valid.

Untuk menghitung korelasi pada uji validitas menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

R_{xy}	= Koefisien korelasi
Σxy	= Jumlah perkalian variabel x dan y
Σx	= Jumlah nilai variabel x
Σy	= Jumlah nilai variabel y
Σx^2	= Jumlah pangkat dua nilai variabel x
Σy^2	= Jumlah pangkat dua nilai variabel Y
N	= Banyaknya sampel

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Sebuah alat ukur atau pertanyaan dalam angket dapat dikategorikan reliabel (andal), jika alat ukur yang digunakan dapat mengukur secara konsisten atau stabil meskipun pertanyaan tersebut diajukan dalam eaktu yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan terhadap butir pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama.

Menurut Sugiyono (2019:173) menyatakan bahwa:

“Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai konsistensi pada objek dan data, apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.”

Untuk melihat uji reliabilitas pada masing-masing instrumen yang digunakan, maka penulis menggunakan koefisien *alpha cronbach* (α) dengan menggunakan fasilitas SPSS untuk jenis pengukuran interval. Koefisien *alpha cronbach* (α) yang

paling sering digunakan karena koefisien ini menggunakan variasi dari item baik untuk format benar atau salah, seperti format pada skala likert. Sehingga koefisien *alpha cronbach* (α) merupakan koefisien yang paling umum digunakan untuk mengevaluasi *internal consistency*.

Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *alpha cronbach* (α) sebagai berikut:

1. *alpha cronbach* (α) < 0,60 maka reliabilitas dikatakan buruk
2. *alpha cronbach* (α) 0,06 – 0,79 maka reliabilitas dikatakan cukup
3. *alpha cronbach* (α) > 0,80 maka reliabilitas dikatakan baik

Uji reliabilitas jika nilai *alpha cronbach* (α) > 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan reliabel atau konsisten dan jika nilai *alpha cronbach* (α) < 0,60 maka kuesioner atau angket dinyatakan tidak reliabel atau tidak konsisten. Adapun rumus *Alpha Cronbach* adalah sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \cdot \left(1 - \frac{\sum si}{st}\right)$$

Keterangan:

α = Koefisien reliabilitas

k = Jumlah item pertanyaan yang diuji

$\sum si$ = Jumlah varian skor tiap item

St = Varian total

3.6.3 Analisis Deskriptif

Menurut (Sugiyono, 2022 : 147) analisis deskriptif yaitu:

“Analisis deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Dalam metode analisis data ini peneliti mengambil analisis deskriptif yaitu analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan peneliti dalam melakukan kegiatan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara *sampling*, kemudian menentukan alat untuk memperoleh data dari elemen yang akan diteliti. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. Adapun untuk menentukan nilai kuisioner nya menggunakan skala likert.
2. Selanjutnya kuisioner disebarkan kepada instansi pemerintah yang dipilih dengan bagian yang telah ditetapkan. Setelah kuisioner diisi oleh responden maka kuisioner tersebut dikumpulkan kembali. Setiap item dari kuisioner memiliki skor mulai dari 1 sampai 5.

Tabel 3. 5
Populasi Penelitian

No.	Pilihan Jawaban	Skor
1.	Sangat Setuju/Sangat Positif	5
2.	Setuju/Sering/Positif	4
3.	Ragu-Ragu/Kadang-Kadang/Netral	3
4.	Tidak Setuju/Jarang/Negatif	2
5.	Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah	1

Sumber: Sugiyono (2022:94)

3. Jika data telah terkumpul semuanya kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan dan dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji statistik. Untuk mengetahui variabel X dan variabel Y maka analisis yang digunakan berdasarkan kepada rata-rata (*mean*) dari setiap variabel.

Nilai rata-rata (*mean*) ini diperoleh dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Untuk rumus rata-rata (*mean*) digunakan sebagai berikut:

Variabel Independen X:

$$Me = \frac{\sum Xi}{N}$$

Variabel Dependen Y:

$$Me = \frac{\sum Yi}{N}$$

Keterangan:

Me : Rata-rata (*mean*)

\sum : jumlah (*sigma*)

Xi : Nilai X ke-i sampai ke-n

Yi : Nilai Y ke-i sampai ke-n

N : Jumlah responden

Setelah mendapatkan nilai rata-rata dari setiap variabel kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah peneliti tentukan berdasarkan nilai-nilai mulai dari nilai terendah (1) dan hingga tertinggi (5) hasil kuisioner.

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah, sedangkan menghitung panjang kelas dengan cara rentang interval dibagi dengan jumlah.

$$P = (\text{Nilai tertinggi} - \text{Nilai Terendah})$$

5 Kriteria

- a. Untuk variabel XI, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dengan 10 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 sedangkan nilai terendah dikalikan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $10 \times 5 = 50$

- Nilai terendah $10 \times 1 = 10$

Lalu panjang kelas interval $((50-10)/5) = 8$

Atas dasar perhitungan diatas, maka peneliti menentukan kriteria penyajian laporan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 6
Pedoman Kategorisasi Penyajian
Laporan Keuangan Daerah

Nilai	Kriteria
10-18	Tidak Berkualitas
19-26	Kurang Berkualitas
27-34	Cukup Berkualitas
35-42	Berkualitas
43-50	Sangat Berkualitas

b. Untuk variabel X2 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan 22 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 sedangkan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $23 \times 5 = 115$

- Nilai terendah $23 \times 1 = 23$

Lalu panjang kelas interval $((115-23)/5) = 18,4$

Atas dasar perhitungan diatas, maka peneliti menentukan kriteria sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Pedoman Kategorisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Nilai	Kriteria
23-41,4	Tidak Memadai
42,5-59,8	Kurang Memadai
60,8-78,2	Cukup Memadai
79,3-96,6	Memadai
97,7-115	Sangat Memadai

c. Untuk variabel Y, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 16 pertanyaan, nilai tertinggi dikalikan dengan 5 sedangkan nilai terendah dikalikan dengan 1, sehingga:

- Nilai tertinggi $16 \times 5 = 80$

- Nilai terendah $16 \times 1 = 16$

Lalu panjang kelas interval $((80-16)/5) = 12,8$

Atas dasar perhitungan diatas, maka peneliti menentukan kriteria sistem pengendalian internal pemerintah sebagai berikut:

Tabel 3. 8
Pedoman Kategorisasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai	Kriteria
16-28,8	Tidak Akuntabel
28,9-41,6	Kurang Akuntabel
41,7-54,4	Cukup Akuntabel
54,5-67,2	Akuntabel
67,3-80	Sangat Akuntabel

3.6.4 Transformasi Data Ordinal Menjadi Interval

Hasil data yang diperoleh dari kuisisioner belum dapat diolah secara langsung. Maka diperlukan proses transformasi data. Surdayana (2022) menyatakan bahwa:

“Mentransformasikan data ordinal menjadi interval berguna untuk memenuhi sebagian syarat analisis parametrik yang mana data setidaknya-tidaknya berskala interval”.

Tranformasi data dengan mengubah data ordinal menjadi interval dilaksanakan sebelum analisis regresi, metode tranformasi data yang digunakan yakni *Method of Succesive Interval* (MSI). Berikut langkah-langkah menggunakan MSI:

1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuisisioner yang disebarkan.
2. Untuk setiap butir pernyataan tentukan frekuensi (f) respondn yang menjawab skor 1,2,3,4,5 untuk setiap item pernyataan.
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi.
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.

5. Menentukan nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif.
6. Menentukan nilai skala (*Scale Value = SV*) untuk setiap skor jawaban yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Dimensi).
7. Menentukan skala (*Scale Value = SV*) untuk masing-masing responden dengan menggunakan rumus:

$$Scale\ Value = \frac{Density\ Lower\ Limit - Density\ at\ Upper\ Limit}{Area\ Below\ Upper\ Limit - Area\ Below\ Lower\ Limit}$$

3.6.5 Analisis Verifikatif

Analisis verifikatif digunakan untuk mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Dalam penelitian ini analisis verifikatif digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam metode verifikatif ini adalah sebagai berikut:

3.6.6 Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan model regresi yang digunakan, terlebih dahulu harus memenuhi uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan persamaan regresi yang diperoleh akurat dan konsisten dalam eliminasi. Dalam uji asumsi klasik terdapat tiga pengujian, yaitu:

3.6.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Penggunaan uji normalitas ini dimaksudkan karena dalam analisis statistik parametrik asumsi yang harus dimiliki adalah bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

Maksud terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik.

Dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan berdasarkan probabilitas (*Asymtotic Significance*) yaitu:

- Jika probabilitas $\geq 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- Jika probabilitas $\leq 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

3.6.6.2 Uji Multikolinierisitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Apabila terjadi ada multikolinieritas, sebaiknya salah satu dari variabel independen yang ada dikeluarkan dari model, lalu pembuatan model regresi diulang kembali.

Untuk mendeteksi tidak adanya multikolinieritas sebagai berikut:

- Jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) tidak lebih dari 10 ($VIF \leq 10$);
atau
- Nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 ($Tolerance \geq 0,1$), maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

3.6.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastisitas maka dampaknya yaitu sulitnya menghitung standar deviasinya yang sebenarnya, dan akan menghasilkannya standar deviasi yang terlalu lebar atau terlalu sempit. Jika tingkat kesalahan varians terus meningkat, tingkat kepercayaan akan menyempit.

Untuk mendeteksi aada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara S S S dan Z D dimata sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y-prediksi Y sesungguhnya) yang telah *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergolombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini digunakan dengan melibatkan 1 variabel terikat yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) serta 2 variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X1 dan X2). Adapun persamaan regresi berganda untuk dua prediktor yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

α = harga Y apabila X=0 (Koefisien konstanta)

$\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 = Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

3.6.8 Analisis Korelasi

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui kuatnya hubungan antar masing-masing variabel. Analisis ini dinyatakan dalam bentuk hubungan positif dan negatif, sedangkan kuat dan lemahnya hubungan dinyatakan dalam besarnya koefisien korelas. Untuk mengetahui hal tersebut, pada penelitian ini peneliti menggunakan rumus korelasi *pearson product moment*.

Adapun rumus korelasi menurut Sugiyono (2021 : 29) yaitu:

$$r = \sqrt{(\sum x^2)(\sum y^2)}$$

Keterangan:

r	= Koefisien Korelasi
$\sum xy$	= Jumlah Skor Total Item
$\sum x^2$	= Jumlah Kuadrat Total Variabel Independen
$\sum y^2$	= Jumlah Koadrat Skor Total Variabel Dependen

Pada umumnya, nilai r dapat bervariasi dari -1 sampai dengan +1 atau secara sistematis ditulis $-1 < r < +1$.

1. Jika $r = 0$ atau mendekati nol, maka hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali sehingga tidak mungkin terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $0 < r < 1$, maka korelasi kedua variabel dikatakan positif atau bersifat searah, dengan kata lain kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel independen terjadi bersama-sama dengan kenaikan atau penurunan nilai-nilai variabel dependen.
3. Jika $-1 < r < 0$, maka korelasi antara kedua variabel dikatakan negatif atau bersifat berkebalikan, dengan kata lain kenaikan nilai-nilai variabel independen akan terjadi bersama-sama dengan penurunan nilai variabel dependen atau sebaliknya.

Untuk melihat hubungan atau korelasi, peneliti mengacu pada pedoman Menurut Sugiyono (2022 : 188) yaitu:

Tabel 3.9
Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Lemah
0,20-0,399	Lemah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

3.6.9 Rancangan Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini berhubungan dengan ada tidaknya pengaruh negatif dan positif antara variabel independen yaitu Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam perumusan hipotesis *statistic*, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis *alternative* (H_a) selalu berpasangan, bila salah satu ditolak, maka yang lainnya pasti diterima, sehingga dapat dibuat keputusan yang tegas, adalah jika (H_0) ditolak, maka (H_a) diterima.

$H_0 : \beta = 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

$H_a : \beta \neq 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah

- $H_{o2} : \beta = 0$, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{a2} : \beta \neq 0$, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{o3} : R = 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{a3} : \beta \neq 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.6.9.1 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Menurut Sugiyono (2022 : 17) uji t yaitu:

“Uji t melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan peran serta parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen dianggap konstan”.

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara parsial (individual) dalam menerangkan variabel dependen. Uji t yaitu suatu uji untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial atau individu menerangkan pengaruh terhadap variabel terikat.

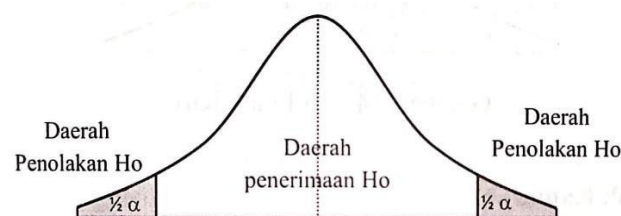
Pengambilan keputusan yaitu dinilai signifikan 0,05 dan membandingkan t hitung dengan t tabel yang ditentukan sebagai berikut (Ghozali, 2011 : 259) :

1. Apabila tingkat signifikan $< \alpha$ (0,05) dan t hitung $> t$ tabel atau $-t$ hitung $< -t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila tingkat signifikan $> \alpha$ (0,05) dan t hitung $< t$ tabel atau $-t$ hitung $> -t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Adapun pengujian hipotesis secara parsial yaitu:

- $H_{o1} : \beta = 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{a1} : \beta \neq 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah
- $H_{o2} : \beta = 0$, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{a2} : \beta \neq 0$, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Gambar 3. 2
Uji Dua Pihak



3.6.9.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pada pengujian ini yang akan diuji adalah pengaruh kedua variabel independen bersama-sama terhadap variabel dependen. Statistik uji yang digunakan adalah Uji F atau yang dikenal dengan *Analysis of Varian* (ANOVA).

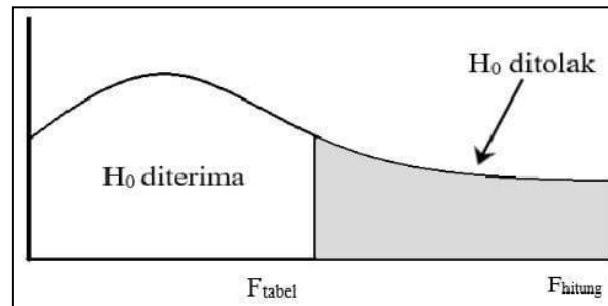
Uji F menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Berikut dasar analisis yang digunakan pada Uji F:

- $F_{hitung} > F_{tabel}$ = maka H_0 ditolak artinya tidak terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $F_{hitung} < F_{tabel}$ = maka H_0 diterima artinya terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun pengujian hipotesis secara simultan (uji f) yaitu:

- $H_{03} : R = 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- $H_{a3} : \beta \neq 0$, Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
-

Gambar 3.3
Kurva Distribusi Uji F



3.6.10 Koefisien Determinasi (R^2)

Langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X1 (Penyajian Laporan Keuangan Daerah) dan variabel X2 (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)) terhadap Y (Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah). Nilai koefisien determinasi dapat diukur dengan nilai R Squar atau *Adjust R-Square*. R-Square digunakan untuk variabel bebas lebih dari satu.

Menurut Gurjati (2012 : 172) untuk melihat besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = \text{Zero Order} \times \beta \times 100\%$$

Menurut Sujarweni (2012 : 188) rumus koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

Kd = Besar atau jumlah koefisien determinasi

R² = nilai koefisien korelasi

Kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

1. Jika Kd mendekati nol (0), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah.
2. Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3.11 Rancangan Kuesioner

Menurut Sugiyono (2022 : 199) menjelaskan kuesioner sebagai berikut:

“Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”.

Kuesioner dapat diberikan kepada responden secara langsung ataupun diberikan melalui *google form* atau melalui pos yang berupa pernyataan atau pertanyaan tertutup atau terbuka.

Maka dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang mana hanya memilih salah satu jawaban dari setiap poin pertanyaan dan pernyataan yang sudah ditentukan. Kuesioner disebarkan kepada Kepala Dinas, Kassubag Keuangan,

Kassubag Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan yang bekerja di SKPD Kabupaten

Bandung Barat.